

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemeriksaan internal atau audit internal dikemukakan oleh IIA (*Institute of Internal Auditor*) yaitu suatu pengukuran atau penilaian kepada proses pemeriksaan yang dikerjakan secara independen, serta dibentuk supaya sebuah organisasi bisa menjalankan organisasinya dengan baik. *Internal Professional Practices Framework* (IPPF), audit internal merupakan kegiatan untuk memberikan sebuah konsultasi serta pernyataan yang independen dan objektif yang dipersiapkan guna memperbaiki kegiatan operasional serta menambah nilai dalam suatu organisasi. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasannya internal audit mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kepada personel organisasi agar mampu menuntaskan tanggung jawabnya secara efektif. Sebab itu para auditor internal bisa memberikan analisis, berbagai penilaian, informasi, rekomendasi, dan nasihat yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang diperiksa.

Sejalan dengan pernyataan *Global Perspective and Insight*, Ayagre (2015), menyatakan internal audit adalah pemeran utama pada proses tata kelola organisasi dengan menyediakan pendekatan disiplin dan sistematis dalam mengawasi pengendalian internal, ketaatan dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta proses manajemen risiko. Audit internal memiliki sebuah peran yang amat penting dalam organisasi oleh karena itu dalam pelaksanaan sebuah kegiatan audit internal harus dilakukan secara efektif demi meningkatkan tata kelola organisasi dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan akuntabilitas pada organisasi sektor publik untuk mewujudkan *good corporate governance* di Indonesia sangat dituntut adanya. *Good Corporate Governance* semakin dituntut wajar saja karena beberapa penelitian yang telah meneliti *good governance* menyatakan sangatnya krisis ekonomi yang ada di Indonesia disebabkan karena pengelolaan jelek (*bad governance*) serta buruknya birokrasi yang ada. Menurut Mardiasmo (2005), untuk menciptakan adanya pemerintahan yang baik (*good governance*) terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inspektorat merupakan organisasi pengawasan internal pada pemerintah mempunyai tanggung jawab besar yakni menciptakan *good governance* yaitu proses tata kelola pemerintahan yang bagus atauu baik, serta bebas dari KKN yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta penerapan pengendalian manajemen yang baik menurut (Pradita, 2010). Pengawasan internal yang diberikan oleh pemerintah melalui inspektorat sebagai organisasi internal pemerintah yang diberi nama sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang disingkat APIP di dalamnya yang ada sebuah sistem pengendalian internal yang dilakukan yaitu audit, review, serta evaluasi. Pengawasan yang dilakukan ini untuk mengetahui apakah tujuan yang telah disusun oleh organisasi pemerintah daerah tercapai, selain itu juga pengawasan mempunyai sebuah fungsi yaitu untuk mengetahui serta mendeteksi adanya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan atas wewenang, adanya pemborosan, serta kebocoran Inspektorat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah atau dapat disebut sebagai audit internal atau pemeriksaan internal. Audit internal yaitu pemeriksaan yang diberikan oleh organisasi pemeriksa yang ada di dalam organisasi yang diperiksa (Mardiasmo, 2005).

Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 berbunyi bahwa inspektorat adalah organisasi pemerintah daerah yang ada di bawah kekuasaan kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota, inspektorat bertugas sebagai organisasi pemerintah daerah yang melakukan pengawasan internal pada kinerja organisasi pemerintah daerah yang ada. Oleh karena itu inspektorat ini sama dengan pengawas/pemeriksa yang ada di dalam sebuah perusahaan, gambaran umumnya seperti itu. Bastian (2014) menyatakan pemeriksaan atau audit internal adalah sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan secara intern pada suatu organisasi untuk mengetahui atas pengelolaan yang dilakukan di dalamnya, serta untuk menilai dan melakukan evaluasi pada sistem pengendalian internal supaya semua anggota dapat efisien dan efektif dalam melakukan pengelolaan serta pertanggung jawabannya dengan cara menganalisis atas pengelolaan, melakukan penilaian, membuat rekomendasi agar dapat lebih baik kedepannya, dan memberikan komentar-komentarnya dengan kegiatan yang telah dilakukan.

Sebuah organisasi yang memiliki tugas untuk melakukan fungsi audit internal secara efektif pasti akan lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki audit internal, hal ini digunakan sebagai langkah awal untuk mendeteksi adanya kecurangan sertasebagai pencegahan. Audit internal secara efektif bisa membantu sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diimpikan (Badara dan Saidin, 2014). Audit atau pemeriksaan internal apabila terlaksanakan dengan baik jelas akan membantu untuk terwujudnya *good governance*, bahkan sekarang untuk menuju *clean governance* inilah yang diinginkan oleh pemerintah pusat dan masyarakat. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dituntut agar dapat memberikan perbaikan secara efisiensi dan efektivitas terhadap peningkatan kinerja sebuah organisasi. Aparat Pengawas Internal Pemerintah

(APIP) memiliki peran untuk menciptakan terselenggaranya pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pada pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan organisasi pengawasan internal yang berada di lingkungan pemerintah daerah memiliki peranan yang penting bagi keberhasilan serta kemajuan untuk pemerintah daerah serta perangkat daerah yang berada di dalamnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Peran pengawasan inspektorat banyak sekali yang mempengaruhinya mulai dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP di dalam prakteknya banyak sekali yang harus diperbaiki karena di dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala seperti kekeluargaan, kebersamaan, pertemanan, dan kemanusiaan yang menonjol dalam melakukan pengawasan. Inilah yang menjadi dasar bagi peneliti melakukan penelitian ini, hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi dari efektivitas audit internal pemerintahan. Di Indonesia masih ada budaya *ewuh pakewuh* (sungkan), inilah kebudayaan yang masih kental dan melekat di negara timur tengah seperti di Indonesia. Pasti setiap auditor yang mengaudit kliennya yang sudah memiliki hubungan baik atau bahkan klien nya merupakan seniornya jelas merasakan adanya sungkan atau segan apabila dalam melakukan tugas audit menemukan temuan yang janggal. Selain itu kompetensi, etika serta independensi seorang auditor internal dirasa dapat meningkatkan efektivitas audit yang dilakukan.

Menurut Muhtar (2008) dalam Usman dan WIdagdo (2016) menyatakan bahwasannya dinamika *ewuh pakewuh* telah masuk dilingkup pemerintahan dinegara yang berkembang seperti di Indonesia ini. Pemerintah belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal dikarenakan adanya kultur yang masih ada

yaitu seperti budaya ewuh pakewuh. Budaya ewuh pekewuh sendiri yaitu budaya yang memiliki perasaan sungkan atau segan, biasanya sikap ini diberikan kepada orang yang memiliki kepangkatan atau jabatan dan hubungan kekeluargaan. Hal inilah yang mengakibatkan tidak bisa optimalnya pemeriksaan yang dilakukan. hal ini berhubungan dengan efektivitas audit karena efektivitas yaitu pencapaian atau hasil yang didapatkan dari pemeriksaan bisa optimal. Oleh karena itu apakah kultur yaitu budaya ewuh pakewuh mempengaruhi terhadap efektivitas audit internal.

Kompetensi dan independensi yang dimiliki seorang auditor internal dalam menjalankan pemeriksaan merupakan hal terpenting dalam pencapaian hasil pemeriksaan yang efektif. Agusti dan Putri (2013) mengartikan kompetensi seorang auditor yaitu auditor harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik, kemampuan, keahlian yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan, dengan kompetensi yang dimiliki auditor dapat mewujudkan efektivitas dalam melakukan pemeriksaannya. Mulyadi (2011) mengatakan independensi adalah sebuah sikap mental yang bebas dari segala bentuk pengaruh yang berasal dari manapun , dan juga tidak boleh bergantung kepada pihak siapapun. Independensi merupakan bentuk kejujuran yang ada pada diri seorang auditor untuk mempertimbangkan fakta yang ada dan juga harus obyektif dalam membuat keputusan, merumuskan, dan menyatakan pendapat. Hubungan antara independensi dan efektivitas sangat erat karena hasil pemeriksaan yang optimal dan tanpa adanya tekanan atau kepentingan siapapun maka akan terwujud adanya efektivitas audit internal pada pemerintahan. Seorang aparat pengawas internal pemerintah mempunyai sebuah standar yang mengatur atas perilaku etisnya dalam menjalankan

tugasnya dalam organisasi mereka bernaung, pada profesi mereka, dan kepada masyarakat, dan diri sendiri. Selain itu seorang auditor juga harus bisa menjaga integritas dan obyektivitas yang dimiliki (Nugrahaningsih, 2005).

Payamta (2002) menyatakan bahwasannya berdasarkan “Pedoman Etika” IFAC, maka etika seorang auditor haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang telah ada untuk mengaturnya dalam menjalankan tugasnya dan melaksanakan atas tindakannya agar professional. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah independen, integritas, professional, obyektifitas, kepercayaan, kemampuan, dan perilaku etika. Dengan penerapan etika yang dilakukan oleh auditor internal tersebut sangat berhubungan sekali dengan efektivitas audit internal karena dengan adanya etika pemeriksaan yang dilakukan dapat professional. Jika melakukan audit dengan professional maka hasil yang didapatkan akan efektif.

Untuk menunjang profesionalisme sebagai auditor internal maka seorang auditor dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor harus berpedoman dengan standar audit yang berlaku, yaitu standar audit yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), standar tersebut terdiri dari standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Audit internal merupakan ukuran penilaian secara independen yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam melakukan pengujian dan evaluasi pada sistem pengendalian internal suatu organisasi. Adam (1994) dalam putri (2011) telah dijelaskan bahwa kualitas internal yang dilakukan selalu berhubungan dengan kompetensi serta obyektivitas yang dilakukan oleh staf internal auditor.

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti efektivitas audit internal hanya beberapa saja dibandingkan terhadap penelitian audit eksternal

yang telah diteliti sebelumnya. Peneliti pada penelitian ini ingin mengetahui variabel bebas atau variabel independen apa saja yang mempengaruhi efektivitas audit internal. Pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh audit internal mempunyai peran tradisional, dimana aktivitas tersebut fokus pada pemantauan pengendalian internal dan ketaatan finansial. Tetapi saat ini peran audit internal menjadi luas dalam fungsi manajemen risiko (Alzeban dan Gwilliam, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Usman dan Widagdo (2016) mengenai pengaruh budaya ewuh pakewuh serta independensi terhadap efektivitas audit internal pada pemerintahan mendapatkan hasil yaitu budaya ewuh pakewuh, independensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah. Afrilia (2019) melakukan penelitian yang sama yaitu mengenai efektivitas audit internal, hasil dari penelitiannya yaitu kompetensi, hubungan auditor internal dengan eksternal, dukungan manajemen, dan independensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal

Penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa budaya ewuh pakewuh, kompetensi, dan independensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintahan. Keunikan pada penelitian ini yaitu menggunakan kultur yaitu budaya *ewuh pakewuh* sebagai variabel independen. Pembaharuan penelitian ini juga ada pada variabel independennya yaitu etika seorang auditor, etika merupakan sikap paling dasar yang harus dijalankan dalam kegiatan apapun seperti hal nya audit/pemeriksaan. Disini peneliti juga ingin mengambil objek yang berada di Madura yang dikarenakan disini ada isu atau kasus yang perlu diteliti. Di Madura ada kasus korupsi yang hampir dilakukan oleh seluruh Bupati di Madura, hanya saja Bupati di Kabupaten

Sumenep yang belum terjerat kasus korupsi. Ketiga Kabupaten di Madura seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan Bupatiya sudah terjerat kasus korupsi, hal inilah yang membuat peneliti untuk tertarik menelitinya. Dikutip dari news.detik.com “pada 1/12/2014 malam mantan bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (FAI) ditangkap oleh KPK karena diduga menerima suap pemberian uang dari Direktur PT Media Karya Santosa”. Tidak hanya itu saja dikutip dari kompas “4/6/2015, mantan Bupati Sampang Noer Tjahja divonis bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan gas di PT Sampang Mandiri Perkasa, dalam persidangan Noer Tjahja divonis 5 tahun penjara”. Mantan Bupati Pamekasan pun juga tertangkan pada 20/10/2017 terjerat tindak pidana korupsi, terdakwa diduga aktif terlibat dalam kasus suap yang diberikan kepada kepala Kejaksaan negeri Pamekasan, selain itu juga terdakwa aktif dalam kasus ini bersama dengan Inspektorat dan kepala Desa Dasok. Hal inilah yang membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana sih peran inspektorat sebagai lembaga pengawas internal di lingkup pemerintahan daerah tersebut apakah berjalan efektif atau tidak. Memang penelitian mengenai audit internal jarang diteliti sehingga peneliti ingin menelitinya. Dari situlah ada gap yang perlu untuk diteliti sehingga nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah sebagai bahan penyusunan kebijakan kedepannya. Jadi pembaharuan dari penelitian ini adalah penambahan berupa variabel independen yaitu etika, dan adanya kasus yang perlu untuk diteliti yaitu kasus korupsi dan bagaimana peran lembaga internal pengawasnya apakah berjalan secara efektif ataukah tidak. Karena pengawasan internal sangat penting untuk mendeteksi sekaligus mencegah terjadinya korupsi.

Dari penjelasan serta pernyataan di atas penelitian ini ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi efektivitas audit internal di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya peran inspektorat dalam kelangsungan pemerintahan di Indonesia, maka peneliti ingin mengetahui seberapa efektif peran audit internal mewujudkan *good governance*. Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui pengaruh tentang budaya ewuh pakewuh, etika, kompetensi, serta independensi yang diperankan auditor internal terhadap terwujudnya efektivitas audit internal pada pemerintahan di inspektorat se Madura.

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas dan penelitian-penelitian terdahulu maka penelitian ini ingin mencari faktor-faktor yang lebih dalam lagi pada efektivits audit internal pemerintah khususnya di Madura. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Budaya Ewuh Pakewuh, Kompetensi, Etika, dan Independensi Auditor Terhadap Efektivitas Audit Internal Pemerintah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dengan itu peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah budaya *ewuh pakewuh* berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah?
3. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah?
4. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya *ewuh pakewuh* terhadap efektivitas audit internal pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap efektivitas audit internal pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap efektivitas audit internal pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian mengenai efektivitas audit internal pemerintahan diharapkan dapat memberi manfaat untuk berbagai pihak. Manfaat tersebut yang diinginkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini agar memiliki manfaat dalam hal efektivitas audit internal pemerintah yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap efektivitas audit internal pemerintah.
- b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam bidang ilmu audit internal, lebih khususnya pada sektor publik yaitu pada pemerintahan.
- c. Untuk bahan rujukan dan juga referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang peningkatan efektivitas audit internal pemerintah .

2. Praktis

a. Bagi penulis

Diharapkan nantinya penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai permasalahan yang ada, khususnya pengaruh budaya *ewuh pakewuh*, kompetensi auditor, etika auditor, serta independensi auditor yang dapat mempengaruhi efektivitas audit internal pemerintahan. Dengan penelitian ini juga penulis dapat menambah wawasannya berkenaan dengan efektivitas audit internal.

b. Bagi pihak objek penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat untuk memberikan sumbang sih pemikiran serta pandangan-pandangan baru nantinya yang dapat berguna bagi

para auditor internal pemerintah bahwasannya pengaruh budaya *ewuh pakewuh*, kompetensi, etika, dan independensi auditor dapat memengaruhi efektivitas audit internal pada pemerintahan. Serta objek penelitian juga dapat mengetahui bahwasannya budaya *ewuh pakewuh*, kompetensi, etika, independensi auditor dapat memengaruhi efektivitas audit yang dilakukan, sehingga dapat mengetahui juga pengaruh yang positif dan negatif.

c. Bagi pembaca dan masyarakat umum

Penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum serta pembacanya tentang efektivitas audit internal yang perlu adanya didalam pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal yang dibahas pada penelitian ini yaitu budaya *ewuh pakewuh*, kompetensi, etika, dan independensi auditor internal pemerintahan. Diharapkan pembaca juga dapat mengetahui ilmu yang mungkin baru baginya, serta menambah wawasannya. Penelitian ini dilakukan pada Madura diharapkan masyarakat umum ketika membacanya mengetahui bagaimana peran inspektorat pada pemerintahan daerah sebagai lembaga pengawasan internal yang ada didalamnya.

3. Kebijakan

Secara kebijakan nantinya supaya penelitian ini bisa sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan bagi pemerintah mengenai efektivitas audit internal pemerintah yaitu:

a. Sebagai bahan rujukan dalam menentukan arah kebijakan perihal efektivitas audit internal yang ada di dalam pemerintah.

- b. Untuk perbaikan kebijakan yang sudah ada, dan melalui penelitian ini dapat mengetahui pengaruh manakah yang baik untuk efektivitas audit internal pemerintah.
- c. Sebagai bahan acuan untuk mengetahui manakah pengaruh yang dapat meningkatkan efektivitas audit internal pemerintah sehingga nantinya pengaruh yang positif dapat ditingkatkan dan dikembangkan dalam perumusan regulasi atau ketentuan yang ada.